

IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PAUD DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SATUAN PENDIDIKAN DI TK LEGINA SUMBAWA BESAR

Syaifuddin Iskandar¹, Badaruddin^{2*}, Ade Sujastiawan³

¹²³Universitas Samawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: badarudin34@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 03 November 2024

Revised: 10 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024

Keywords

Implementasi;

Pendidikan;

Satuan Pendidikan;

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Paud Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan di TK Legina Sumbawa Besar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi BOSP, mengidentifikasi pengaruh BOSP terhadap peningkatan kualitas satuan pendidikan di TK Legina Sumbawa Besar, dan proses penyaluran dana BOSP dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah PAUD dalam upaya peningkatan kualitas satuan pendidikan di TK Legina Sumbawa Besar dilakukan dengan membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan, mulai dari perawatan gedung sekolah, pengadaan alat peraga, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung proses pembelajaran, serta kegiatan-kegiatan yang membantu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan juga siswa Pengaruh BOSP terhadap peningkatan kualitas satuan pendidikan berkaitan erat dengan pembiayaan proses dan ketersediaan komponen-komponen yang menunjang kualitas pembelajaran yang mempengaruhi peningkatan kualitas satuan pendidikan di TK Lagina Sumbawa Besar yang meliputi: 1. peserta didik; 2. tenaga pendidik dan kependidikan; 3.sarana dan prasarana termasuk kurikulum dan metode pembelajaran; 4. manajemen sekolah.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan elemen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu (Adam dan Dharma, 2015).

Mekanisme pengelolaan dana BOS berubah mulai tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi money follow function. Dana BOS pun dimasukkan dalam pengelolaan daerah, sehingga anggaran BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Aturan baru ini memang agak rumit, prosedurnya lebih panjang karena birokrasinya jadi bertingkat. Dengan sistem baru ini, dana BOS dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan bertanggungjawab penyaluran anggaran ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggungjawab terhadap peruntukan/penggunaan anggaran.

Harus diakui, ini periode yang sulit bagi sekolah, sehingga sering sekali anggaran BOS macet dan terlambat diterima sekolah. Akibatnya, sekolah banyak yang berhutang kepada pihak ketiga. Lebih celaka lagi, kalau berhutangnya kepada rentenir dengan risiko memberikan bunga.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2020, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Tentu ini terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Semoga dengan mekanisme baru ini, tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah.

Harapannya, terobosan bagus ini juga diikuti tata kelola dana BOS yang lebih baik. Caranya, adalah perencanaan penganggaran di sekolah dengan transaksi belanja sekolah harus dikontrol dengan sistem yang baik dan transparan sehingga kualitas belanjanya terjaga. SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) yang sudah digunakan di Kemdikbud sejak tahun 2019 bisa menjadi salah satu embrio untuk memperbaiki tata kelola anggaran di sekolah. Sosialisasi kepada sekolah tentang penggunaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel harus digencarkan.

Tentu saja akan lebih berjalan bagus jika mulai rencana anggaran, transaksi, hingga pelaporan keuangan sekolah dibuat satu sistem yang terintegrasi sehingga semua pengelolaan sumber daya di sekolah dapat dikontrol dan dianalisis dengan cermat. Pemerintah akan punya Big Data untuk melihat secara cermat dan menganalisis komponen-komponen apa saja yang paling banyak memerlukan anggaran di sekolah. Dengan data ini, juga dapat dilakukan analisis pembiayaan pendidikan, sejauh mana komponen biaya pendidikan berkorelasi dengan kualitas pendidikan di sekolah. Pada akhirnya, pemerintah akan bisa membuat peta mutu dari Big Data tersebut dapat membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mencontoh suatu sekolah atau pemerintah daerah yang sudah bisa mengelola dana BOS dengan baik. Di samping itu, pemerintah juga bisa memberikan rekomendasi komponen-komponen mana yang harus diprioritaskan untuk dibelanjakan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan layanan pendidikan.

Harapannya, semoga BOS betul-betul dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, mencetak SDM yang berkualitas, hingga kemudian menghasilkan bos-bos (orang-orang besar) yang memimpin Indonesia dengan baik, bijak, berkarakter. (Didik Suhardi, Ph.D., Direktur PSMP Kemdiknas (2008–2015) dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud (2015–2019))

Pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran penting dalam membentuk dasar pembelajaran anak sejak dini. Pada periode emas perkembangan anak, pendidikan yang berkualitas di tingkat PAUD dapat memberikan landasan yang kuat untuk perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Penyelenggara terbesar saat ini lembaga PAUD merupakan oleh masyarakat dan swasta. Data yang tertera di Dapodik pada tahun 2019 memaparkan bahwa TK yang merupakan satuan dari PAUD terbanyak saat ini sebagian besar atau sebanyak 95,7% diselenggarakan oleh swasta. Meningkatnya jumlah PAUD yang didirikan oleh masyarakat tentunya sangat membantu pemerintah dalam peningkatan jalan PAUD. Namun, dengan demikian keberadaan PAUD tersebut perlu adanya pengontrolan perihal standar pelayanan minimal yang notabene tuntutan standar pelayanan yang berkelanjutan. Hal tersebut perlu diwujudkan dalam pelaksanaan PAUD supaya mutu layanan PAUD untuk anak usia 0-6 tahun yang merupakan masa (the golden age) mewujudkan yang terbaik memikirkannya

dalam menumbuhkembangkan generasi muda penerus bangsa yang bermutu dan berarti. (Sudiyono & Murdiyningrum, 2020). Sehingga memberikan ketercapaian tujuan serta kualitas Pendidikan yang baik (Latifah & Murniyati, 2022)

TK Legina Sumbawa Besar sebagai salah satu satuan pendidikan PAUD menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan operasional sekolah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di TK tersebut adalah ketersediaan dana untuk operasional sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah PAUD (BOSP) merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Program ini bertujuan untuk menyediakan dana bantuan kepada satuan pendidikan PAUD guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Berdasarkan observasi sementara, peneliti menemukan beberapa permasalahan dimana ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa program bantuan operasional pendidikan di TK Legina sudah terimplementasi. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa program bantuan operasional pendidikan tersebut belum terimplemetasi. Hal ini terkait dalam pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAPBS) hanya disusun oleh kepala sekolah dan bendahara saja, tidak di diskusikan bersama dengan guru atau pendidik di TK Legina yang seharusnya pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAPBS) dilakukan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tindakan penyelewengan yang dapat merugikan lembaga pendidikan. Selain itu dalam rancangan pembuatan rencana anggaran belanja diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah tetapi digunakan untuk kesejahteraan guru.

Oleh karena itu, meskipun program BOSP telah diberlakukan di TK Legina Sumbawa Besar, implementasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Perlu dilakukan analisis mendalam terkait implementasi BOSP di TK tersebut guna mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas satuan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah PAUD (BOSP) dalam Upaya Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan di TK Legina Sumbawa Besar”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan dalam upaya mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Penentuan tahap berikut teknik yang digunakan harus mencerminkan relevansi dengan penomena penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau pradikma penomenologi. Krick dan Milor (dalam Moleong, 2003: 30) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan soasial yang secara vundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

PEMBAHASAN

Implementasi Dana BOSP di TK Lagina Sumbawa Besar

1. Pengajuan

Pengajuan dana BOSP diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen) masing-masing kecamatan dengan persyaratan dan lampiran sebagai berikut :

Syarat satuan pendidikan yang dapat menerima BOSP ialah :

- a) Satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada dapodik;
- b) Mengisi serta melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c) Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 9, serta bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- d) Satuan pendidikan yaitu TK Lagina Sumbawa Besar diwajibkan mengisi formulir pengajuan BOSP yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Setelah melengkapi persyaratan dan lampiran untuk pengajuan dana BOSP, berkas dikumpulkan di Korsatpen dan dikirim ke Dinas Pendidikan untuk di cek oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbawa Besar.

2. Persetujuan

Terkait persetujuan penerimaan dana BOSP, Satuan Pendidikan yang masuk dalam kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas diwajibkan mengambil dan mengelola dana BOSP tersebut.

Jika memang Satuan Pendidikan tidak berkenan untuk mengambil dan mengelola BOSP diwajibkan lapor dan membuat surat pernyataan yang ditujukan ke Kepala Dinas sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pencairan

Pencairan dana BOSP mula-mula disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada waktu yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 50% dari pagu alokasi;
- Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% dari pagu alokasi.

Kemudian, Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan Dana BOSP secara langsung ke rekening sekolah. Pemberian Dana BOSP harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Pengambilan dana BOSP di TK Lagina Sumbawa dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP dan dilakukan setelah Kepala Sekolah mengirim laporan awal dana BOSP ke Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan

Sumbawa dengan lampiran foto copy buku rekening bank, foto copy jadwal kegiatan pembelajaran dan foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD sesuai lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

4. Penggunaan

Penggunaan dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam hal penggunaannya TK Lagina Sumbawa harus menggunakan dana tersebut secara profesional dengan menerapkan prinsip tersebut diatas karena tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian membuat perencanaan penggunaan dana yakni menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) yang disusun setiap penyaluran dana sesuai dengan lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seperti halnya yang tertera di nomor 3 di atas.

Pengaruh BOSP terhadap peningkatan kualitas satuan pendidikan di TK Legina Sumbawa Besar.

Peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu sasaran bantuan dana BOSP di TK Lagina Sumbawa berkaitan erat dengan pembiayaan proses dan ketersediaan komponen-komponen yang menunjang kualitas pembelajaran yang meliputi: 1. peserta didik; 2. tenaga pendidik dan kependidikan; 3. sarana dan prasarana termasuk kurikulum dan metode pembelajaran; 4. manajemen sekolah.

Suatu pendidikan berkualitas dapat diindikasikan dari tiga hal yaitu input, proses, dan output. Input pendidikan meliputi peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan. Proses pendidikan atau pembelajaran adalah interaksi dan interkomunikasi antar semua komponen pembelajaran. Sedangkan output pendidikan merupakan hasil dari proses pembelajaran berupa lulusan dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Input pendidikan dinilai berkualitas terhadap peserta didik, pendidik, kurikulum dan sarana prasarana. Peserta didik berkualitas adalah apabila memiliki tingkat multi kecerdasan dan derajat kesehatan serta semangat dan motivasi setiap individu sebagai obyek dan subyek dalam proses pembelajaran. Pendidik berkualitas sebagai subyek pembelajaran meliputi tingkat pendidikan, penguasaan Iptek, masa kerja dan pengalaman mendidik. Disamping itu semangat dan motivasi berkorban untuk kemajuan peserta didik juga sangat menentukan kualitas seorang pendidik. Selanjutnya kualitas kurikulum sebagai konten pembelajaran meliputi tingkat relevansi antara muatan kurikulum dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat sebagai pengguna output pendidikan. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan meliputi ketersediaan, kecukupan dan kelayakan semua komponen penunjang yang dapat memperlancar proses pembelajaran berkualitas. Tersedianya input yang cukup dan berkualitas menjadi prasyarat terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas. Interaksi dan interkomunikasi yang dinamis antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan dukungan sarana prasarana serta metode pembelajaran yang memadai

memungkinkan proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran dan penerapan metode-metode pembelajaran inovatif dapat berlangsung apabila ditunjang dengan kemampuan guru yang memadai dan dengan dukungan dana yang cukup. Untuk meningkatkan kualitas input, proses dan output pendidikan termasuk kualitas tenaga pendidik dalam memanfaatkan media dan metode pembelajaran inovatif, tenaga pendidik memerlukan berbagai pelatihan / penataran secara kontinyu dan periodik. Tuntutan kualitas ini memerlukan dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari dana BOSP maupun sumber-sumber lainnya. Sehingga pengalokasian dana BOSP untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menunjang keefektifan proses pembelajaran menjadi salah satu indikasi dampak dana BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan. BOS berdampak pada peningkatan kualitas pendidik, potensi siswa semakin berkembang, memiliki nilai Ujian Nasional yang terus meningkat dan dapat diterima ke sekolah yang lebih tinggi dan berkualitas.

- Proses penyaluran dana BOSP dari tingkat pusat ke tingkat daerah.

Dalam proses pengajuan dana BOSP satuan pendidikan perlu untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP kepada Kementerian. Hal ini sesuai dengan Permendikbudristek 63/2022 Bagian Ketujuh tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP, Pasal 51 ayat 2 poin a dan b, dan dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini

KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini sudah dipaparkan tentang berbagai macam kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa temuan hasil pada penelitian lalu dijadikan kesimpulan untuk mengetahui bagaimana implementasi pada pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di TK Legina Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa. Mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Yaitu: Menginput data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Dapodik. Data dari Dapodik akan ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga Bank. Jika data sudah sama atau valid, tahap selanjutnya yakni mengirimkan data tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk kemudian dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah. Dalam proses implementasi bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada TK Legina Sumbawa Besar, terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya implementasi pelaksanaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) faktor-faktor tersebut adalah : 1) Seringkali cairnya penggunaan dana BOS ini sangat lamban bahkan tidak sesuai dengan waktu untuk menggunakannya bisa disebut juga tidak sesuai jadwal dari pemerintah untuk menurunkan dana BOS dalam anggarannya untuk masing-masing sekolah dengan ketentuan sudah ditentukan, 2) Pandemi covid 19 mengakibatkan banyak kebutuhan dari sekolah yang teralihkan dan di tunda dengan digantikan pembelian protokol kesehatan, 3) kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS yang membuat sekolah menerima pengaduan

Wali Murid yang menilai sekolah belum bisa mengoptimalkan pengelolaan dana BOS yang menyebabkan tim pengelolaan BOS di TK Legina Sumbawa Besar patah semangat akan tetapi komite sekolah selalu memberikan semangat dan nasehat. 4) Adanya campur tangan birokrasi dalam Pengelolaan Dana BOS kerap kali terjadi dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk membeli barang yang sudah ditentukan oleh pihak birokrasi, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penggunaan dana BOS secara keseluruhan di sekolah TK Legina Sumbawa Besar. Selain terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan penggunaan dana BOS di TK Legina Sumbawa Besar, pada penelitian ini telah ditemukan aspek yang mendorong atau memberikan dukungan untuk proses jalannya implementasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah TK Legina Sumbawa Besar. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan sekolah Membuat minat anak untuk sekolah di TK Legina Sumbawa Besar 2) Dampak disekitar sekolah yang dirasakan dengan adanya kebijakan dana BOS 3) Kondisi Angka Putus Sekolah dapat ditekan Setelah Adanya Program BOS sehingga jumlah siswa stabil dan jumlah dana BOS tetap stabil. 4) karena masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang bingung dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga Masyarakat antusias dengan memilih sekolah gratis. Karena pengelolaan dana BOS di TK Legina Sumbawa Besar sesuai JUKNIS dan menggratiskan biaya SPP banyak orangtua yang ingin menitipkan anaknya untuk bersekolah di TK Legina Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. *Leo*, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta Arif Rohman, 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transaransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Badrudin. 2013. *Manajemen Peserta Didik (Bahan Ajar)*. PT. Indeks. Jakarta.
- Barsani, Muchran, Asri Jaya. 2018. *Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Makassar*. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol.2, No.2,
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Djafar, Chairil, Suparman. 2017. *Efektifitas pelaksanaan program dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Biromaru di Kabupaten Sigi*.
- Dunn, W.N. 2001. *Analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Yogyakarta.
- Dwijowijoto, 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.